



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen rencana perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang bersifat indikatif.

Renja-PD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Disamping itu, Renja-PD merupakan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur atau memperbaiki kinerja aparatur, mengembangkan akuntabilitas publik serta mendorong partisipasi masyarakat.

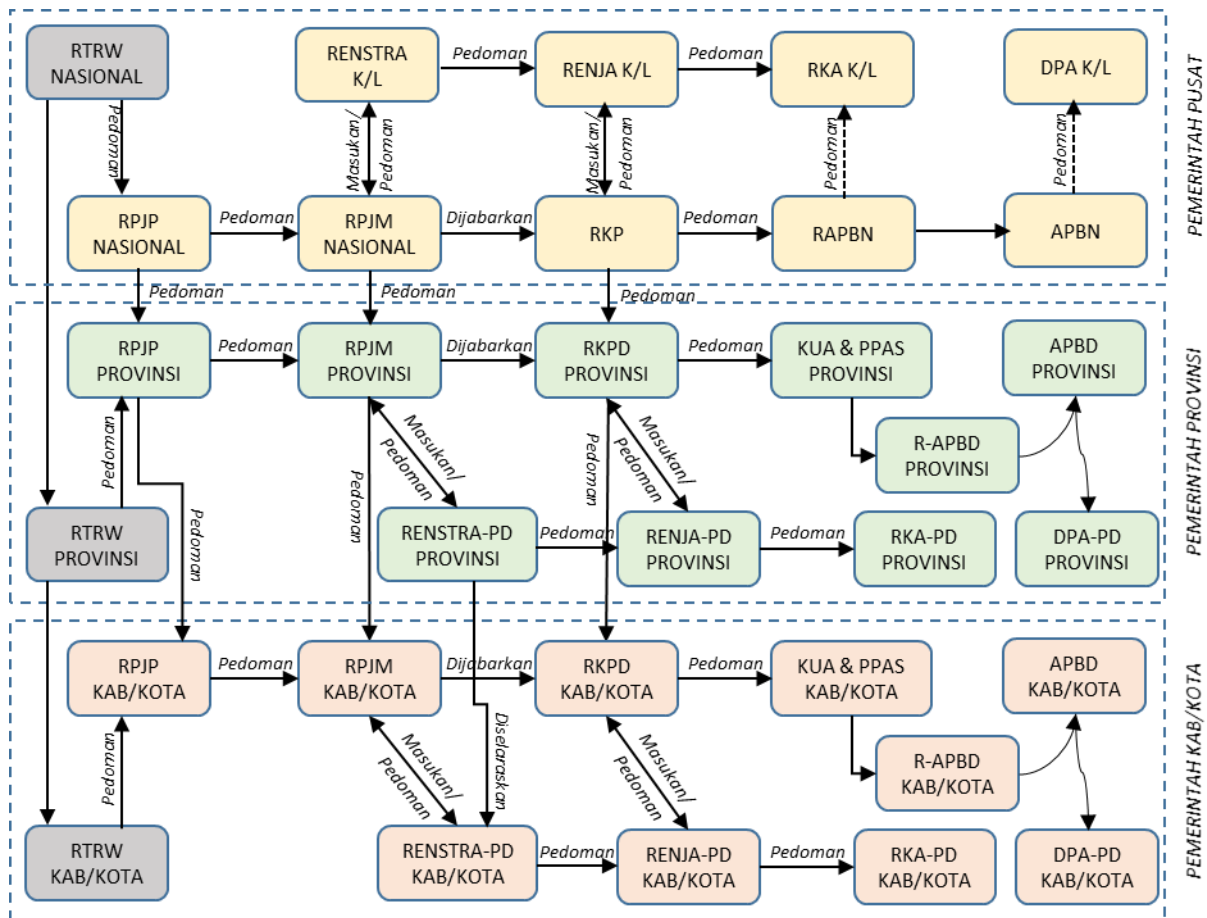
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode Tahun 2014-2019. Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Sebagai dokumen rencana kerja perangkat daerah 5 (lima) tahunan, Renja-PD menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai penjabaran rencana kerja tahunan bagi perangkat daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Gambar 1.1.

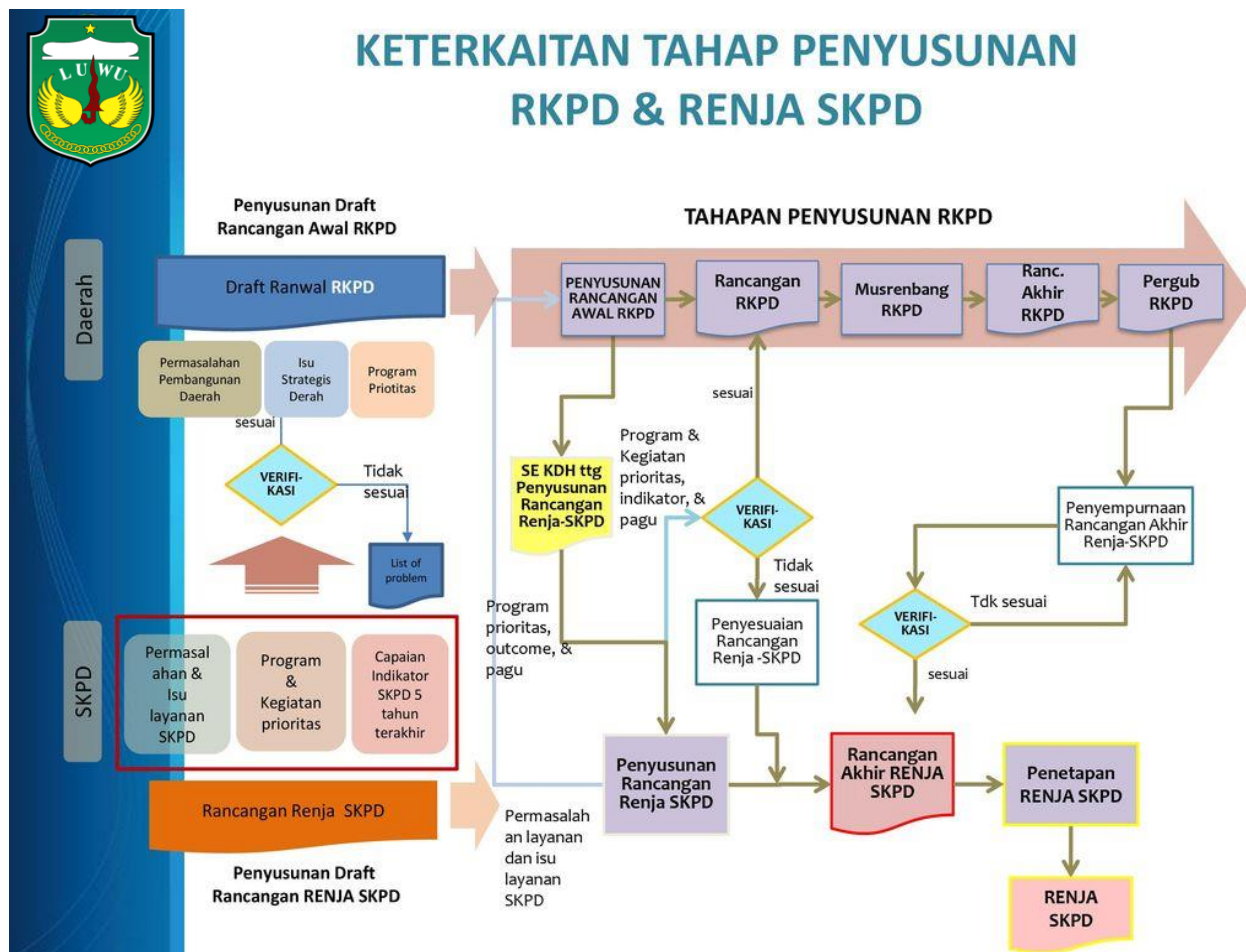
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam

Sistem Perencanaan Pembangunan



Penyusunan Renja ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan *ancaman* yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renja Dinas

Perdagangan Tahun 2019-2024 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perdagangan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.



1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 / M-DAG/ PER/ 4 / 2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 24/M-Dag/Per/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klaisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; dan
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 145 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Startegi Perangkat Daeah Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyesuaikan kebijakan pembangunan di bidang perdagangan dengan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan pada periode Renstra yang lalu;
2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perdagangan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan substansi sajian tersebut diatas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

○ **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan sistematika penulisan.

○ **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisikan evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perdagangan Tahun 2020 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

○ **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

○ **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

○ **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yang memuat indikator Keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Perdagangan selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Program/kegiatan yang telah dicapai pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah :

a. Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum

a. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.2.230.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.214.719.600,- atau mencapai 09,62 %

b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 %

c. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.126.745.000,- atau mencapai 25,34 %

b. Belanja Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.16.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau mencapai 00,00 %

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.4.067.715.298,- dan terealisasi sebesar Rp.1.765.718.856,- atau mencapai 43,00 %

c. Administrtasi Umum Perangkat daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.235.625.560,- dan terealisasi sebesar Rp.18.114.950,- atau mencapai 08,00 %

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.387.355.584,- dan terealisasi sebesar Rp.158.003.070,- atau mencapai 41,00 %

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.42.899.129,- dan terealisasi sebesar Rp.13.647.543,- atau mencapai 32,00 %

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.2.468.248.120,- dan terealisasi sebesar Rp.353.558.072,- atau mencapai 08,00 %

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota

Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022

dianggarkan sebesar Rp.2.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.195.000,- atau mencapai 45,00 %

b. Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota

Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.95.011.320,- dan terealisasi sebesar Rp.70.186.050,- atau mencapai 74,00 %

c. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.2.942.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.190.000,- atau mencapai 40,00 %

4. Program Pengembangan Ekspor

a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.19.658.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau mencapai 0%

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar

Rp.85.165.940,- dan terealisasi sebesar Rp.31.171.280,- atau mencapai 37,00 %

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Luwu**

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
3.30.01	1. ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	10 dokumen	-	2 dokumen	2 dokuken	100%	2 dokumen	2 dokumen	20%
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokuemn RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunana Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	5 Dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%

3.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang disusun (LAKIP)	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
3.30.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan tunjangan, Jumlah Bulan penediaan Gaji dan tunjangan	2707 OB	-	396 OB	396 OB	100%	396 OB	396 OB	20%
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	20%
3.30.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	70 laporan	-	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	14 laporan	20%
3.30.01.2.03	3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 orang	3 orang	-	-	-	-	-	0%
	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 orang	-	-	-	-	-	-	0%
3.30.01.2.06	4.Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	30 jenis	60%
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41 unit	9 unit	12 unit	12 unit	100%	9 unit	30 unit	73%
3.30.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 jenis	-	-	-	-	20 jenis	20 jenis	30%

3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	60 jenis	12 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	73%
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 jenis	-	6 jenis	6 jenis	100%	8 jenis	8 jenis	30%
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	42 jenis	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	0 Jenis	2 Jenis	10%
3.30.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	Jumlah jenis bahan material kantor yang disediakan	100 jenis	-	100 jenis	100 jenis	100%	440 jenis	440 jenis	440%
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah jenis jamuan makan minum yang disediakan	100 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	44 jenis	44 jenis	40%
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas Dalam daerah dan luar daerah	1210 kali	99 kali	65 kali	65 kali	100%	65 kali	308 kali	25%
3.30.01.2.07	5.Penyediaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang diadakan	26 unit	-	-	-	0%	-	-	0%
3.30.01.2.08	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1500 surat	523 surat	340 surat	340 surat	100%	-	-	0%
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	884 OB	-	237 OB	237 OB	100%	237 OB	237 OB	26%
3.30.01.2.09	7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

3.30.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
3.30.01.2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan Gedung/kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	35 unit	-	4 unit	4 unit	100%	-	-	0%
3.30.01.2.09.04	Pemeliharaan/rehabilitasi darana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Luas bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan	100m2	-	100m	100m	100%	-	-	0%
3.30.03.2.01	8.Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Ditribusi Perdagangan									
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Saranan Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	5 pasar	1 pasar	3 pasar	3 pasar	100%	2 pasar	5 pasar	100%
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelola Sarana Ditribusi Perdagangan	Jumlah sarana ditribusi perdagangan (pasar) yang difasiitasi	10 pasar	-	10 pasar	10 pasar	100%	10 pasar	10 pasar	100%
3.30.04.2.02	9.Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ti tingkat pasar kabupaten/Kota									
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha ditribusi barang dalam satu kabupaten/kota	Jumlah pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	135 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	121 kali	135 kali	100%
3.30.06.2.01	9.Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan									
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	13 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	11 kali	13 kali	100%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan Pengawasan/penyuluhan	14 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	12 kali	14 kali	100%

3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Pelaksanaan Penyidikan	52 kali	-	-	-	0%	10 kali	10 kali	19%
------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------	---	---	---	----	---------	---------	-----

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota pada bidang urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kewenangan Kabupaten/Kota Di Bidang Urusan Perdagangan

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) .
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasarkabupaten/kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
		pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang local dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, secara garis besar Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu selama periode tahun 2019-2024 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Kewenangan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Sarana Distribusi Perdagangan
Dilakukan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, berbagai pasar yang ada di Kabupaten Luwu, antara lain:
 - a. Pembangunan Pasar Percontohan Belopa (Pasar Tradisional Modern);
 - b. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana perangkat daerah yaitu gedung UPT Metrologi legal, kelengkapannya Laboratorium serta tersedianya prasarana mobilitas (kendaraan operasional);
 - c. Pembangunan Pusat Niaga Bajo;
 - d. Pembangunan gudang dengan sistem resi gudang (SRG);
 - e. Pembangunan dan Revitalisasi pasar rakyat di setiap Kecamatan
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Melakukan monitoring ke seluruh pasar dalam rentang waktu 2 minggu sekali dan menyampaikan harga kebutuhan pokok di berbagai media secara rutin. Disamping itu, setiap tahun diadakan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok khususnya pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri, yaitu antara lain:
 - a. Kecamatan Ponrang (1 kali)
 - b. Kecamatan Walenrang (1 kali)
 - c. Kecamatan Suli (1 kali)
 - d. Kecamatan Belopa (2 kali)

- e. Kecamatan Bupon (1 kali)
 - f. Kecamatan Bajo Barat(1 kali)
4. Pengembangan Ekspor
Promosi produk unggulan daerah melalui pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
 5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu secara terus-menerus melakukan:
 - a. Pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - b. Pengawasan penggunaan alat UTTP ;
 - c. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP;
 - d. Sosialisasi tentang perlindungan konsumen & kemetrolagian.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014, Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan. Kondisi pasar merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan volume perdagangan di suatu daerah. Terdapat 24 pasar di Kabupaten Luwu, dengan kondisi sebagaimana terlihat pada tabel.

Tabel 2.2.
Keberadaan Pasar di Kabupaten Luwu, Tahun 2020

NO	PASAR	KONDISI BANGUNAN	STATUS LAHAN	HARI PASAR
1	BONEPUTE (Kec. Larompong Selatan)	PERMANEN	SERTIFIKAT	SENIN, KAMIS
2	LAOMPONG (Kec. Larompong)	PERMANEN	SERTIFIKAT	KAMIS, MINGGU
3	SULI (Kec. Suli)	PERMANEN	SERTIFIKAT	RABU, SABTU
4	LINDAJANG (Kec. Suli)	PERMANEN	SERTIFIKAT	SELASA, JUMAT
5	BELOPA (Kec. Belopa)	PERMANEN	SERTIFIKAT	KAMIS, MINGGU
6	BAJO (Kec. Bajo)	SEMI PERMANEN	SERTIFIKAT	SELASA, SABTU
7	LANGKIDI (Kec. Bajo)	TIDAK LAYAK	TIDAK SERTIFIKAT	
8	SAMPEANG (Kec. Bajo Barat)	PERMANEN	SERTIFIKAT	

9	PADANGSAPPA (Kec. Ponrang)	PERMANEN	TIDAK SERTIFIKAT	RABU, MINGGU
10	NOLING (Kec. Bupon)	SEMI PERMANEN	SERTIFIKAT	SELASA, SABTU
11	CILALLANG (Kec. Kamanre)	PERMANEN	SERTIFIKAT	SENIN, JUMAT
12	LANIPA (Kec. Ponrang Selatan)	PERMANEN	SERTIFIKAT	
13	BUA (Kec. Bua)	PERMANEN	SERTIFIKAT	SELASA, SABTU
14	KARETAN (Kec. Walenrang)	SEMI PERMANEN	TIDAK SERTIFIKAT	SELASA, JUMAT
15	BATUSITANDUK (Kec. Walenrang)	SEMI PERMANEN	TIDAK SERTIFIKAT	SENIN, RABU, SABTU
16	LAMASI (Lamasi)	SEMI PERMANEN	TIDAK SERTIFIKAT	KAMIS, MINGGU
17	TO' LEMO (Lamasi)	SEMI PERMANEN	SERTIFIKAT	SELASA, JUMAT
18	SUMABU (Kec. Kamanre)	SEMI PERMANEN	TIDAK SERTIFIKAT	
19	BONELEMO (Kec. Bajo Barat)	SEMI PERMANEN	TIDAK SERTIFIKAT	
20	KADUNDUNG (Kec. Bajo Barat)	PERMANEN	SERTIFIKAT	
21	SALUTUBU (Kec. Walenrang)	TIDAK LAYAK	TIDAK SERTIFIKAT	
22	RANTE DAMAI (Kec. Walenrang Timur)	TIDAK LAYAK	TIDAK SERTIFIKAT	
23	LAMASI PANTAI (Lamasi Timur)	TIDAK LAYAK	TIDAK SERTIFIKAT	
24	DADEKO (Kec. Larompong Selatan)			RABU, SABTU

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 24 pasar yang ada di Kabupaten Luwu, terdapat 11 pasar atau 45.83% yang sudah memiliki bangunan permanen, sedangkan yang dalam kondisi semi permanen adalah sejumlah 8 pasar atau 33,33%, sisanya merupakan pasar yang belum layak. Apabila dilihat dari status

lahan, baru 11 pasar atau 45,83% yang sudah bersertifikat, sedangkan sisanya yaitu 13 pasar atau 54,17% belum bersertifikat. Selanjutnya, dapat dilihat pula bahwa aktivitas pasar yang ada di Kabupaten Luwu tidak berlangsung setiap hari, tetapi hanya ramai pada hari-hari tertentu.

Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwa dariseluruh pasar tersebut, total jumlah los yang ada adalah 1.593, kios sejumlah 1.146, dengan pedagang sejumlah 2.734, sebagaimana terlihat secara rinci di bawah ini.

Tabel 2.3.
Jumlah Los, Kios dan Pedagang Pasar di Kabupaten Luwu
Tahun 2020

NO	PASAR	JUMLAH			SARANA PRASARANA	
		LOS	KIOS	PEDAGANG	REFRESENTATIF	TRADISIONAL
1	BONEPUTE (Kec. Larompong Selatan)	28	32	24		V
2	LAOMPONG (Kec. Larompong Selatan)	198	50	244	V	
3	SULI (Kec. Suli)	199	156	197	V	
4	LINDAJANG (Kec. Sul Barati)	80	16	155	V	
5	BELOPA (Kec. Belopa)	276	233	549	V	
6	BAJO (Kec. Bajo)	200	80	182		V
7	LANGKIDI (Kec. Bajo)					
8	SAMPEANG (Kec. Bajo Barat)					
9	PADANGSAPPA (Kec. Ponrang)	98	132	388		V
10	NOLING (Kec. Bupon)					
11	CILALLANG (Kec. Kamanre)	86	50	246		V
12	LANIPA (Kec. Ponrang Selatan)					
13	BUA (Kec. Bua)	199	123	160		V
14	KARETAN (Kec. Walenrang)	48	21	50		V

15	BATUSITANDUK (Kec. Walenrang)	-	12	112		V
16	LAMASI (Lamasi)	156	241	218		V
17	TO' LEMO (Lamasi)	24		79		V
18	SUMABU (Kec. Kamanre)					
19	BONELEMO (Kec. Bajo Barat)					
20	KADUNDUNG (Kec. Bajo Barat)					
21	SALUTUBU (Kec. Walenrang)					
22	RANTE DAMAI (Kec. Walenrang Timur)					
23	LAMASI PANTAI (Lamasi Timur)					
24	DADEKO (Kec. Larompong Selatan)			103		V
Jumlah		1.593	1.146	2.734		

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2021.

Pedagang tersebut di atas, sebagian besar adalah pedagang pakaian yaitu sejumlah 670, pedagang sayur sejumlah 456, dan pedagang ikan sejumlah 441. Rincian pedagang yang beraktivitas di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah dan Jenis Dagangan di Pasar yang ada di Kabupaten Luwu
Tahun 2020

No.	Pasar	Jumlah dan Jenis Dagangan															
		Pakaian	Beras	Daging	Ikan	Ayam	Sayur	Pecah Belah	Tukang Jahit	Salon	Rempah	Sepatu/Sandal	Mainan	Pestisida	Emas	Campuran	Warung Makan
1	BONEPUTE (Kec. Larompong Selatan)	3	6	0	10	2	11	1	0	0	4	3	3	1	0	8	1
2	LAOMPONG (Kec. Larompong)	40	22	2	27	5	45	15	1	0	8	12	12	4	7	37	7
3	SULI (Kec. Suli)	30	13	1	25	8	30	12	2	0	10	9	8	5	6	23	15
4	LINDAJANG (Kec. Suli)	32	6	0	38	5	13	11	1	0	6	6	11	5	1	12	8
5	BELOPA (Kec. Belopa)	212	15	1	120	12	56	24	12	0	4	16	10	3	8	45	11
6	BAJO (Kec. Bajo)	36	9	1	37	8	28	6	3	2	5	8	5	4	4	15	11
7	LANGKIDI (Kec. Bajo)	10	1	1	6	3	12	2	0	0	0	1	4	1	0	4	1
8	SAMPEANG (Kec. Bajo Barat)	2	0	0	3	0	4	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
9	PADANGSAPPA (Kec. Ponrang)	55	60	2	25	13	49	29	5	0	45	30	17	3	1	39	15
10	NOLING (Kec. Bupon)	29	15	2	20	3	33	11	3	1	0	10	6	6	1	31	12
11	CILALLANG (Kec. Kamanre)	46	23	1	11	11	32	15	1	0	20	22	13	4	6	39	2

No.	Pasar	Jumlah dan Jenis Dagangan															
		Pakaian	Beras	Daging	Ikan	Ayam	Sayur	Pecah Belah	Tukang Jahit	Salon	Rempah	Sepatu/Sandal	Mainan	Pestisida	Emas	Campuran	Warung Makan
12	LANIPA (Kec. Ponrang Selatan)																
13	BUA (Kec. Bua)	35	15	2	15	10	18	16	3	0	10	16	5	0	2	10	3
14	KARETAN (Kec. Walenrang)	15	12	1	0	2	0	3	1	1	1	0	1	4	0	2	7
15	BATUSITANDUK (Kec. Walenrang)	20	7	2	20	2	20	4	1	1	5	14	2	2	0	7	5
16	LAMASI (Lamasi)	55	10	1	36	7	45	3	2	2	8	17	8	2	1	20	7
17	TO' LEMO (Lamasi)	16	1	0	12	1	10	1	0	1	4	4	1	2	0	25	1
18	SUMABU (Kec. Kamanre)	13	2	0	4	2	5	2	0	0	3	2	2	1	0	5	2
19	BONELEMO (Kec. Bajo Barat)	5	5	0	5	1	7	0	0	0	2	4	0	1	0	8	2
20	KADUNDUNG (Kec. Bajo Barat)	5	4	0	5	1	7	0	0	0	0	1	2	2	0	5	1
21	SALUTUBU Kec. Walenrang)	3	2	0	10	5	20	1	0	0	2	1	0	1	0	3	2
22	RANTE DAMAI (Kec. Walenrang Timur)	4	6	0	10	3	10	3	0	0	2	2	0	4	0	3	3
23	LAMASI PANTAI (Lamasi Timur)	4	2	4	2	2	1	0	0	1	1	0	2	0	0	2	2
24	DADEKO (Kec. Larompong Selatan)																
Jumlah		670	236	21	441	106	456	160	35	9	141	179	113	56	37	344	118

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, kepada setiap pedagang tersebut dipungut retribusi. Besaran tarif retribusi disesuaikan dengan kondisi pasar yang digunakan pedagang, yaitu Los, Pelataran dan Kios. Dari ketiga jenis fasilitas tersebut, total retribusi yang menjadi penerimaan asli daerah adalah sejumlah Rp1,44 miliar, dengan perolehan terbesar adalah dari Pelataran yaitu sejumlah Rp761,21 juta, diikuti Kios sejumlah Rp510,16 juta, dan Los yaitu sejumlah Rp169,51 juta. Rincian jumlah penerimaan retribusi dari masing-masing pasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.
Penerimaan Daerah dari Retribusi Pasar di Kabupaten Luwu
Tahun 2020

No.	Pasar	PENERIMAAN RETRIBUSI		
		LOS	PELATARAN	KIOS
1	BONEPUTE (Kec. Larompong Selatan)	-	4.880.000	15.000.000
2	LAOMPONG (Kec. Larompong)	-	77.234.000	44.925.000
3	SULI (Kec. Suli)	17.590.000	89.935.000	162.435.000
4	LINDAJANG (Kec. Suli)	17.045.000	29.843.000	11.000.000
5	BELOPA (Kec. Belopa)	39.145.000	124.512.000	145.180.000
6	BAJO (Kec. Bajo)	-	60.609.000	-
7	LANGKIDI (Kec. Bajo)	-	-	-
8	SAMPEANG (Kec. Bajo Barat)	-	-	-
9	PADANGSAPPA (Kec. Ponrang)	11.795.000	63.537.000	29.700.000
10	NOLING (Kec. Bupon)	-	-	-
11	CILALLANG (Kec. Kamanre)	49.050.000	62.383.000	85.600.000
12	LANIPA (Kec. Ponrang Selatan)	-	-	-
13	BUA (Kec. Bua)	15.210.000	47.265.000	12.000.000
14	KARETAN (Kec. Walenrang)	7.500.000	37.607.000	-
15	BATUSITANDUK (Kec. Walenrang)	-	84.275.000	4.320.000
16	LAMASI (Lamasi)	-	46.810.000	-

17	TO' LEMO (Lamasi)	3.610.000	11.355.000	-
18	SUMABU (Kec. Kamanre)			
19	BONELEMO (Kec. Bajo Barat)			
20	KADUNDUNG (Kec. Bajo Barat)			
21	SALUTUBU Kec. Walenrang)			
22	RANTE DAMAI (Kec. Walenrang Timur)			
23	LAMASI PANTAI (Lamasi Timur)			
24	DADEKO (Kec. Larompong Selatan)	9.570.000	24.965.000	-
Jumlah		130.365.000	761.208.000	510.160.000

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diukur pencapaian kinerja Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan berbagai indikator. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan di Kabupaten Luwu berdasarkan indikator yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Ketersediaan dokumen laporan informasi harga kebutuhan pokok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					100%				
2	Jumlah Alat UTTP yang diawasi dan ditera dan tera ulang																		
3	Persentase jumlah waktu pengawasan barang beredar																		
4	Jumlah PAD yang di pungut dari jasa retribusi pelayanan Tera/Tera Ualng Alat UTTP																		
4	Jumlah produk UKM dan potensi daerah yang di pameran	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada/tidak	10	10	10	Ada/tidak	Ada/tidak	10	10	10	0%	0%	100%	100%	100%
6	Jumlah pelaksanaan pameran	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada/tidak	Ada/tidak	5	5	5	Ada/tidak	Ada/tidak	5	5	5	0%	0%	100%	100%	100%
7	Jumlah lokasi tempat pelaksanaan pasar murah		Ada/tidak		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah retribusi yang dipungut dari jasa pelayanan pasar		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah pasar yang direvitalisasi		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	ada	100%	100%	100%	100%	00%
10	Jumlah pasar yang dibangun / revitalisasi																		
11	Jumlah sarana pendukung pasar yang dipelihara																		
12	Jumlah pasar yang berfungsi optimal																		
13	Jumlah angkatan pelatihan pengembangan ekspor																		
14	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pelatihan pengembangan ekspor																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina																		
16	Jumlah bantuan diberikan kepada pedagang kaki lima dan asongan																		
17	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)									10,22	9,98	9,87							
18	Ekspor bersih Perdagangan																		
19	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal																		

Dinas Perdagangan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Meskipun demikian, diakui bahwa masih kurang maksimal mengingat dalam Renstra Dinas Perdagangan periode sebelumnya belum tersusun indikator yang baik dan target yang jelas, sehingga sulit diukur keberhasilannya berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi perhatian untuk disempurnakan dalam penyusunan Renstra ini.

Meskipun demikian, beberapa indikator yang ada pada tabel di atas sudah menunjukkan berbagai hal terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya informasi harga kebutuhan pokok secara reguler di Kabupaten Luwu yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan. Selain itu, Dinas Perdagangan juga secara rutin melaksanakan promosi/pameran untuk memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Luwu keluar daerah.

Selain itu, meskipun tidak tersedia data yang valid, Dinas Perdagangan juga secara rutin melaksanakan tera dan tera ulang alat-alat UTTP, melakukan pengawasan barang beredar, memperoleh PAD dari retribusi pelayanan tera/tera ulang alat UTTP, melaksanakan pasar murah untuk menjamin stabilitas harga bahan pokok, membangun/rehab/revitalisasi berbagai pasar yang ada di Kabupaten Luwu, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta membina pedagang asongan/kaki lima.

Salah satu indikator penting dari kinerja Dinas Perdagangan dan menjadi indikator makro pembangunan daerah adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Kontribusi ini diukur dengan membagi nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB Kabupaten Luwu menurut harga berlaku.

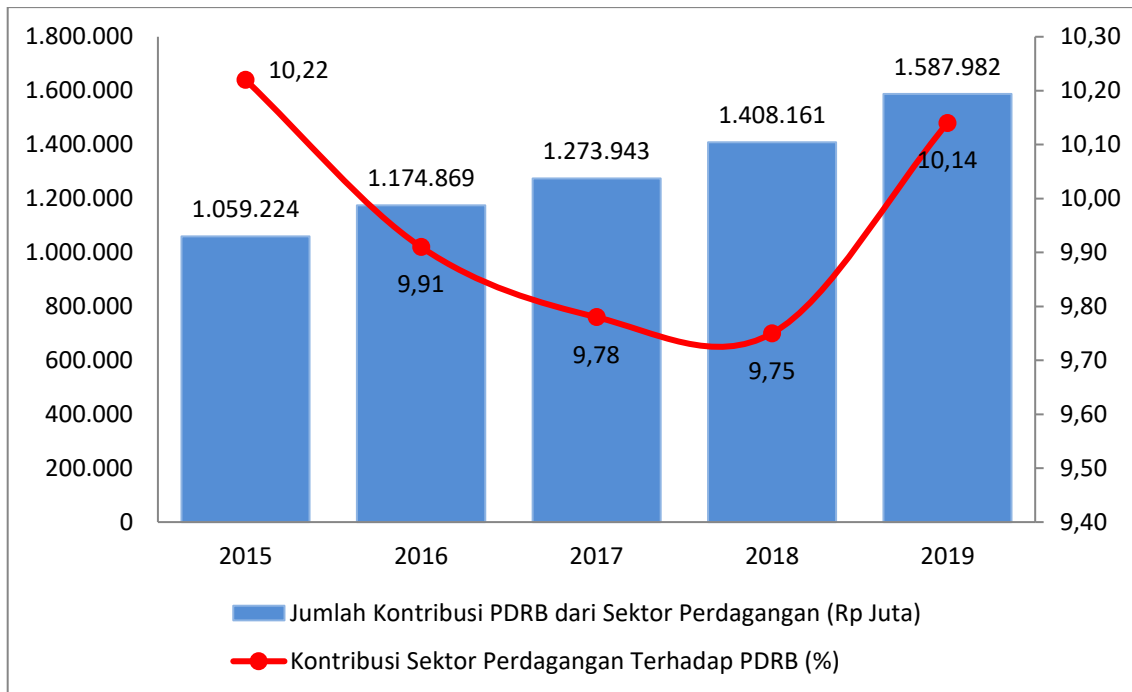
Berdasarkan nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Luwu, tercatat pada tahun 2014 sebesar Rp925,69 miliar dan meningkat menjadi Rp1,29 triliun pada tahun 2017, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,66% per tahun. Namun demikian, kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah terus menurun dalam lima tahun terakhir, merosot dari 10,26% tahun 2014 menjadi sekitar 9,87% tahun 2017.

Nilai kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB yang terus menurun menggambarkan bahwa pertumbuhan PDRB riil sektor ini terus menurun akibat menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.2.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Tahun 2015 - 2019



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan terdahulu, Dinas Perdagangan menggunakan anggaran yang tercantum dalam DPA. Selama periode tahun 2020-2024, kinerja pendanaan Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -II					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -II					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke -II					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah				7.357,71	7.537,42				7.292,50	7.349,40				99,11	97,51	2,44	0,78
Belanja Tidak Langsung				2.047,71	3.310,23				1.992,23	3.169,68				97,29	95,75	61,66	59,10
Gaji Pokok / Uang Representasi				1.322,73	1.936,56				1.311,48	1.915,79				99,15	98,93	46,41	46,08
Tunjangan Keluarga				116,15	199,94				115,04	198,12				99,05	99,09	72,14	72,22
Tunjangan Jabatan				164,78	173,87				163,79	171,29				99,40	98,51	5,52	4,58
Tunjangan Fungsional Umum				30,22	70,19				29,87	69,55				98,84	99,09	132,28	132,88
Tunjangan Beras				72,61	118,20				71,77	116,96				98,84	98,95	62,78	62,97
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus				2,21	2,20				2,20	2,20				99,44	99,63	(0,26)	(0,07)
Pembulatan Gaji				0,02	0,03				0,02	0,03				100,55	99,22	74,85	72,54
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				336,50	738,00				298,07	642,31				88,58	87,03	119,32	115,49
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				2,50	71,25				-	53,44				-	75,00		
Belanja Langsung				5.310,00	4.227,19				5.300,28	4.179,72				99,82	98,88	(20,39)	(21,14)

Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran				815,62	955,63				813,53	943,31				99,74	98,71	17,17	15,95
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur				651,81	135,48				650,76	135,43				99,84	99,96	(79,22)	(79,19)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				17,50	41,90				17,50	41,80				100,00	99,76	139,43	138,86
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				43,00	24,85				42,60	17,72				99,07	71,31	(42,21)	(58,40)
Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan				184,42	171,95				184,19	171,21				99,88	99,57	(6,76)	(7,05)
Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri				503,05	652,82				497,80	634,10				98,96	97,13	29,77	27,38
Peningkatan Sarana & Prasarana Perdagangan				3.094,60	2.244,57				3.093,90	2.236,15				99,98	99,63	(27,47)	(27,72)

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, Tahun 2020.

Capaian kinerja anggaran sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018, anggaran Dinas Perdagangan tumbuh sebesar 2,44%, sedangkan realisasinya tumbuh sebesar 0,78%. Dapat dilihat pula bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung sangat tinggi, yaitu sebesar 61,66% pada anggaran dan sebesar 59,10 pada realisasinya. Sedangkan untuk belanja langsung mengalami penurunan, yaitu masing-masing -20,39% dan 21,14%. Program strategis perangkat daerah yang mengalami pertumbuhan anggaran adalah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, yaitu sebesar 29,77% dan 27,38%. Sedangkan program strategis perangkat daerah lainnya mengalami penurunan.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
3.30.01.01	Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
3.30.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	25.249.909	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Renstra & Renja Serta Perubahan Renstra & Renja Yang Disusun	2 Dokumen	6.800.000	
3.30.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen RKA -SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.828.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.120.000	

3.30.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.010.131	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.400.000	
3.30.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.490.194	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.120.000	
3.30.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.541.795	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.120.000	
3.30.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen laporan caoaian kinerja yang disusun	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Luwu	Jumlah dokumen laporan caoaian kinerja yang disusun	1 Dokumen	490.000	
3.30.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun (LAKIP)	4 Dokumen	7.070.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun (LAKIP)	4 Dokumen	7.000.000	
3.30.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3.30.01.02.01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 Ob	4.231.976.633	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 Ob	4.063.901.878	
			Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan	24 Ob				Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan	24 Ob		

3.30.01.02.05	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	5.049.818	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1.660.720	
3.30.01.02.06	Pengelolaan & Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Luwu	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	2.020.000	Pengelolaan & Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Luwu	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	976.900	
3.30.01.02.07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	5.049.687	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	1.175.800	
3.30.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
3.30.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	2.648.523	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	585.000	
3.30.01.06.02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	10.100.000	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Unit	22.500.000	
3.30.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	5.049.955	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	2.499.210	
3.30.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3.010.022	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	1.450.350	

3.30.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	19.089.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	18.900.000	
3.30.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	11.261.349	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	17.789.900	
3.30.01.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	21.917.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	2.675.000	
3.30.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Luwu	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120 Ok	168.056.021	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Luwu	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120 Ok	166.392.100	
			jumlah perjalanan dinas luar daerah	42 Ok				jumlah perjalanan dinas luar daerah	42 Ok		
3.30.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
3.30.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telpon, air, dan listrik	12 Buah	27.810.940	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telpon, air, dan listrik	12 Buah	27.535.584	
3.30.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	864 Ob	361.892.090	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	864 Ob	358.820.000	
3.30.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										

3.30.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	49.702.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	42.899.129	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										
3.30.03.22	Pembangunan & Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										
3.30.03.22.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/ direhabilitasi	3 Pasar	1.878.687.752	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/ direhabilitasi	3 Pasar	2.097.388.160	
3.30.03.22.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	16 Pasar	473.818.708	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	16 Pasar	370.859.960	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING										
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota										
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 kali	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 kali	1.320.000	

3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 bulan	-	Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 bulan	500.000	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 bulan	-	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Kab. Luwu	Jumlah Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 bulan	850.000	
3.30.04.25	Pengendalian Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										
3.30.04.25.01	Pemantauan Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting Pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	172 Orang / Hari	-	Pemantauan Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	172 Orang / Hari	30.566.570	
3.30.04.25.02	Pemantauan Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	172 Orang / Hari	40.398.081	Pemantauan Harga, & Stok Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Luwu	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	172 Orang / Hari	6.073.250	
3.30.04.25.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler	1 kali	100.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler	1 kali	58.371.500	

3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota										
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen peizinan	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	1 kali	-	Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen peizinan	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	1 kali	850.000	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Luwu	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3 kali	10.000.000	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Luwu	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3 kali	1.242.500	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Luwu	Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3 kali	10.000.000	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Luwu	Jumlah pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	3 kali	850.000	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor										
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 kabupaten/kota										
3.30.05.2.01.03	Pameran dagang Lokal	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	50.000.000	Pameran dagang Lokal	Kab. Luwu	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	19.658.000	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen										
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang & Pengawasan										
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang	12 Kali	35.349.101	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang	12 Kali	45.660.850	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan	12 Kali	50.000.000	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan	12 Kali	26.509.090	
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52 Kali	22.785.000	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Luwu	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52 Kali	12.996.000	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga dilakukan secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kab. Luwu tentunya perlu mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat selain program dan kegiatan yang telah di rumuskan oleh Dinas Perdagangan Kab. Luwu terkait rencana pencapaian target RPJMD Kab. Luwu dan Renstra Dinas Perdagangan Kab. Luwu tahun 2019-2024.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai Renja kelembagaan pemerintah, maka keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan. Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten pada setiap periode memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan untuk dalam menumbuh-kembangkan sinergitas pembangunan untuk meningkatkan daya saing, pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional dan daerah.

3.3.1 Telaah Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Perdagangan RI dan dalam rangka keberhasilan sektor perdagangan, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Kementerian Perdagangan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga urusan perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan nyata yang difokuskan pada 2 (dua) sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional bidang pasar dan perlindungan konsumen;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan program 10.000 pasar di seluruh Indonesia;

3.3.2 Telaah Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Renja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai isu global dan nasional yang dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi

Sulawesi Selatan antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, pertumbuhan ekonomi, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politik dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya, rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

- Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah.
- Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor serta pengendalian Impor.
- Pengintegrasian dan Perluasan sektor Perdagangan serta Pengendalian inflasi dibawah inflasi nasional.
- Peningkatan Pengamanan Perdagangan.

2. Sasaran:

- ✓ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, dengan indikator:
 - % ASN Nilai SKP Kategori Baik.
 - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan).
 - Nilai SAKIP OPD.
- ✓ Meningkatkan Nilai Ekspor Bersih (Surplus) Perdagangan, dengan indikator
 - Persentase Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Surplus).
 - Persentase Nilai Impor Sebesar 10 % dibawah Nilai Ekspor
- ✓ Meningkatkan Kerjasama Perdagangan Internasional, dengan indikator:
 - Jumlah Lokasi Pameran Promosi Dalam dan Luar Negeri
 - Jumlah MOU Produk Perdagangan Yang DiKerjasamakan
- ✓ Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektifitas sistem distribusi daerah, serta wirausaha baru sektor perdagangan, dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang.
- ✓ Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan

- indikator Jumlah harga komoditi yang terpantau.
- ✓ Meningkatnya pengawasan barang beredar, dengan indikator Jumlah barang beredar/ jasa yang diawasi.
 - ✓ Meningkatnya tertib niaga pelaku usaha, dengan indikator umlah gudang yang diawasi.
 - ✓ Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, dengan indikator:
 - Jumlah BPSK/LPKSM yang difasilitasi;
 - Jumlah peserta sosialisasi.
3. Strategi:
- ❖ Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - ❖ Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, Pelaku dan Pengawasan Ekspor dan Impor.
 - ❖ Peningkatan Promosi dan Informasi Pasar Ekspor
 - ❖ Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Sistem Distribusi Barang
4. Arah Kebijakan:
- Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.
 - Pembinaan pengembangan dan kerjasama desa.
 - Pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
 - a. Pembinaan pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur

kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu **"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSAL RELIGI"**. Untuk terwujudnya visi tersebut, terdapat 2 misi RPJMD yang diemban Dinas Perdagangan yaitu misi kesatu yakni **"Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel"** dan misi ke-4 yakni **"Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja"**.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsif.
2. Meningkatkan volume perdagangan Kabupaten Luwu.

Tugas dan fungsi mendasar Dinas Perdagangan adalah menyelenggarakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan volume perdagangan di wilayah Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator "Nilai SAKIP OPD".
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Dinas Perdagangan.
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, dengan indikator:
 - ✓ Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%); dan
 - ✓ Nilai PDRB sektor perdagangan (triliun rupiah)

Arsitektur kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 berikut targetnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu

Tahun 2020-2024

Visi RPJMD	Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi						
Misi ke-1 RPJMD	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel						
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	BB	A
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Dinas Perdagangan	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Misi ke-8 RPJMD	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang kondusif berwawasan lingkungan						

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kab. Luwu Tahun 2023, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan Perdagangan di Kabupaten Luwu oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kab. Luwu Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- c. Pengelolaan & Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyediaan Bahan/Material
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembangunan & Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting
 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pasar rakyat
 - c. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingka Agen dan Pasar rakyat
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - a. Pemantauan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - b. Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota

- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - b. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - c. Pengawasan Penyaluran Penggunaan Pupuk dan Petisida Bersubsidi
- 4. Program Pengembangan ekspor
 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang bagi Produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Kabupaten/Kota
 - a.Pameran Dagang nasional
 - b. Pameran dagang lokal
- 5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan
- 4) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- 5) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Tabel 4
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu
Tahun 2023

KODE						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	SSH		Prakiraan Maju		
							Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu Indikatif	Target	Harga Satuan	Pagu Indikatif
							Tolok Ukur			Target	Harga Satuan			
														(11)
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.523.654.422			8.232.952.806
						Dinas Perdagangan					8.523.654.422			8.232.952.806
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang	100	%		5.246.665.188			5.002.640.272
3.30.01.2.01						Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	%		10.640.000			10.640.000
3.30.01.2.01.01						Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra & Renja serta perubahan Renstra & Renja yang disusun	2	Dokumen		3.640.000			3.640.000
3.30.01.2.01.02						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1.400.000	dokumen		1.400.000
3.30.01.2.01.03						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1.120.000	dokumen		1.120.000

3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1.120.000	dokumen		1.120.000
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1.680.000	dokumen		1.680.000
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	4	Laporan		1.680.000	5		1.680.000
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat Kinerja	100	%		4.068.236.878	100		4.068.236.878
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Disediakan Gaji Dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	2.683	OB		4.063.901.878	2.683	OB	4.063.901.878
		Jumlah Bulan Penyediaan Gaji & Tunjangan	24	OB			24		
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		1.634.800	1		1.634.800
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	1	laporan		1.260.400	1		1.260.400
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan		1.439.800	14		1.439.800
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		84.250.000	100		84.250.000
3.30.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	50	Org		30.000.000			30.000.000

3.30.01.2.05.09	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah ASN yang di fasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	Org		44.250.000			44.250.000
3.30.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang di fasilitasi mengikuti bimbingan teknis	1	Org		10.000.000			10.000.000
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah	100	%		309.338.610	100		309.338.610
3.30.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	jenis		1.103.000			1.103.000
3.30.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	unit		57.995.200	3		57.995.200
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	11	Jenis		2.620.910	11		2.620.910
3.30.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		1.219.500	2		1.219.500
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		25.200.000	2		25.200.000
3.30.01.2.06.07	Penyediaan bahan material	jumlah bahan material yang disediakan	44	jenis		20.089.900	44		20.089.900
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah jenis fasilitasi tamu	3	jenis		19.875.000	3		19.875.000
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan ksonultasi yang di selenggarakan				181.235.100	0		181.235.100

3.30.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Pemerintah Daerah Diadakan	100	%		30.000.000			30.000.000
3.30.01.207.05	Pengadaan mebel	jumlah mebel yang diadakan	3	unit		30.000.000			30.000.000
3.30.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	2			394.891.800			394.891.800
3.30.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik				36.160.800			36.160.800
3.30.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				358.731.000			358.731.000
3.30.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	2			349.307.900			105.282.984
3.30.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	19 unit			83.350.000			83.350.000
3.30.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20	unit		12.400.000			12.400.000
3.30.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya					253.557.900			9.532.984
30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan kondisi layak				2.717.161.797,00			2.672.702.597,00
30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan kondisi layak				2.717.161.797,00			2.672.702.597,00

30.03.2.01.01						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	5 pasar			1.550.245.967,00			1.550.245.967,00
30.03.2.01.01						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	16	Pasar		1.166.915.830			1.122.456.630
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					257.354.787			255.137.287
3	30	04	2	01		Menjamin Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kab/Kota					18.524.250			18.524.250
3	30	04	2	01	01	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi & Singkronisasi				10.292.500			10.292.500
3	30	04	2	01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pelaksanaan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting				4.050.000		-	4.050.000
3	30	04	2	01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.	Laporan pelaksanaan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting				4.181.750			4.181.750
3	30	04	2	02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten	100	%		217.823.737,00			217.823.737,00
3	30	04	2	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12	Kali		32.262.537	12		32.262.537

3	30	04	2	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		10	Kali		6.731.750,00			6.731.750,00
3	30	04	2	02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota	Lokasi Pasar Murah	1			178.829.450			178.829.450
3	30	04	2	03		pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota		100	%		21.006.800,00			18.789.300,00
3	30	04	2	03	01	pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan	10	Kali		2.092.500			2.092.500
3	30	04	2	03	02	pengawasan pegadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Pelaksanaan Pegawasan	10	Kali		5.362.500			3.145.000
3	30	04	2	03	03	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Pelaksanaan Pegawasan	3	Kali		13.551.800			13.551.800
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DALAM WILAYAH PROV. SUL. SEL. DAN LUAR PROV. SUL. SEL.	Cakupan penyelenggaraan kewenangan daerah dalam rangka Pengembangan Ekspor				214.781.500			214.781.500
3	30	05	2	01		penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk desa unggulan	Pameran Produk Unggulan di dalam Daerah dan Luar Daerah Sul. Sel.	100	%		214.781.500			214.781.500
3	30	05	2	01	02	Pameran Dagang nasional	Pameran Produk dan Potensi Daerah di Luar Prov.Sul. Sel.	1	Kali		104.719.000			104.719.000
3	30	05	2	01	03	Pameran Dagang Lokal	Pameran Produk dan Potensi Daerah Dalam Provinsi	1	Kali		110.062.500			110.062.500
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100,00	%		87.691.150,00			87.691.150,00

3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100,00	%		87.691.150,00			87.691.150,00
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang	50	Kali		18.287.500,00			18.287.500,00
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan	12	Kali		49.906.150			49.906.150
3	30	06	2	01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52	Kali		19.497.500			19.497.500



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Beberapa program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan
Tahun 2023

KODE							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Harga satuan	Jumlah	Sumbe r Dana	Lokas i	
								Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan							
								Tolok Ukur	Volume						
														(11)	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					8.523.654.422			
							Dinas Perdagangan					8.523.654.422			
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang	100	%		5.246.665.188			
3.30.01.2.01							Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	%		10.640.000			
3.30.01.2.01.01							Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra & Renja serta perubahan Renstra & Renja yang disusun	2	Dokume n		3.640.000	DAU	Kab. Luwu	
5.1.02.02.02.0071							Belanja Lembur					3.640.000			
							Uang Lembur Non PNS		28	OJ	30.000	840.000			
							Uang Lembir PNS Gol. IV		14	OJ	60.000	840.000			
							Uang Lembur PNS Gol. III		14	OJ	40.000	560.000			
							Uang Lembur PNS Gol. III		28	OJ	50.000	1.400.000			
3.30.01.2.01.02							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokume n	1			1.400.000	DAU	Kab. Luwu

5.1.02.02.02.0071						Belanja Lembur						1.400.000		
						Uang Lembur Non PNS		14	OJ	30.000	420.000			
						Uang Lembir PNS Gol. III		7	OJ	40.000	280.000			
						Uang Lembir PNS Gol. III		14	OJ	50.000	700.000			
3.30.01.2.01.03						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1.120.000	DAU	Kab. Luwu	
5.1.02.02.02.0071						Belanja Lembur					1.120.000			
						Uang Lembur Non PNS		14	OJ	30.000	420.000			
						Uang Lembir PNS Gol. III		14	OJ	50.000	700.000			
3.30.01.2.01.04						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1.120.000	DAU	Kab. Luwu	
5.1.02.02.02.0071						Belanja Lembur					1.120.000			
						Uang Lembur Non PNS		14	OJ	30.000	420.000			
						Uang Lembir PNS Gol. III		14	OJ	50.000	700.000			
3.30.01.2.01.05						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen	1		1.680.000	DAU	Kab. Luwu	
5.1.02.02.02.0071						Belanja Lembur					1.680.000			
						Uang Lembur Non PNS		21	OJ	30.000	630.000			
						Uang Lembir PNS Gol. III		21	OJ	50.000	1.050.000			

3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	4	Laporan		1.680.000	DAU	Kab. Luwu
5.1.02.02.02.0071	Belanja Lembur					1.680.000		
	Uang Lembur Non PNS		21	OJ	30.000	630.000		
	Uang Lembir PNS Gol. III		21	OJ	50.000	1.050.000		
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat Kinerja	100	%		4.068.236.878		
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Disediakan Gaji Dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	2.683	OB		4.063.901.878	DAU	Kab. Luwu
		Jumlah Bulan Penyediaan Gaji & Tunjangan	24	OB				
5.1	BELANJA OPERASI					4.063.901.878		
5.1.01	Belanja Pegawai					4.063.901.878		
5.1.01.01	Belanja Gaji & Tunjangan ASN					3.303.106.878		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS					2.388.673.000		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.388.673.000		
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	2.388.673.000	2.388.673.000		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					274.847.000		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					274.847.000		
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	274.847.000	274.847.000		

5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					197.098.000		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					197.098.000		
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	197.098.000	197.098.000		
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					78.710.000		
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					78.710.000		
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	78.710.000	78.710.000		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					174.591.000		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN					174.591.000		
	Belanja Tunjangan Beras ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	174.591.000	174.591.000		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					2.254.000		
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					2.254.000		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	2.254.000	2.254.000		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					38.000		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN					38.000		
	Belanja Pembulatan Gaji ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	38.000	38.000		
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					150.561.000		
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					150.561.000		

		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	150.561.000	150.561.000		
5.1.01.01.10		Belanja luaran Jaminan Kecelakaan ASN					5.733.000		
5.1.01.01.10.0001		Belanja luaran Jaminan Kecelakaan ASN					5.733.000		
		Belanja luaran Jaminan Kecelakaan ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	5.733.000	5.733.000		
5.1.01.01.11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					17.199.000		
5.1.01.01.11.0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					17.199.000		
		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	17.199.000	17.199.000		
5.1.01.01.12		Belanja Iuran Taperum ASN					13.402.878		
5.1.01.01.12.0001		Belanja Iuran Taperum ASN					13.402.878		
		Belanja Iuran Taperum ASN (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	13.402.878	13.402.878		
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN					647.795.000		
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN					647.795.000		
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					647.795.000		
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	647.795.000	647.795.000		
5.1.01.03		Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya					113.000.000		

5.1.01.03.02						Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah					113.000.000		
5.1.01.03.02.0005						Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa umum pelayanan pasar					96.500.000		
						Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa umum pelayanan pasar (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	96.500.000	96.500.000		
5.1.01.03.02.0011						Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa tera/tera ulang					1.500.000		
						Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa tera/tera ulang (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	1.500.000	1.500.000		
5.1.01.03.02.0018						Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa usaha tempat khusus parkir					15.000.000		
						Belanja Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa usaha tempat khusus parkir (Belanja Gaji & Tunjangan)		1	Thn	15.000.000	15.000.000		
3.30.01.2.02.05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan		1.634.800	DAU	Kab. Luwu

5	1	02	01	01	0025	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor					140.400		
						- Kertas HVS F4		1	Rim	70.200	70.200		
						- HVS A4		1	Rim	70.200	70.200		
5	1	02	01	01	0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan bahan komputer					374.400		
						- tinta printer		3	buah	124.800	374.400		
5	1	02	01	01	0071	Belanja Lembur					1.120.000		
						- uang lembur non PNS		14	OJ	30.000	420.000		
						- uang lembur PNS Gol. III		14	OJ	50.000	700.000		
3.30.01.2.02.06						Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	1	laporan		1.260.400	DAU	Kab. Luwu
5	1	02	01	01	0025	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor					140.400		
						- Kertas HVS F4		1	Rim	70.200	70.200		
						- HVS A4		1	Rim	70.200	70.200		
5	1	02	01	01	0071	Belanja lembur					1.120.000		
						- uang lembur non PNS		14	OJ	30.000	420.000		
						- uang lembur PNS Gol. III		14	OJ	50.000	700.000		
3.30.01.2.02.07						Koordinasi dan penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan		1.439.800	DAU	Kab. Luwu
5	1	02	01	01	0025	Belanja alat dan bahan untuk kegiatan kantor					70.200		

						Kertas HVS F4		1	Rim	70.200	70.200		
5	1	02	01	01	0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan bahan komputer					249.600		
						tinta printer epson		2	buah	124.800	249.600		
5	1	02	01	01	0071	Belanja lembur					1.120.000		
						- uang lembur non PNS		14	OJ	30.000	420.000		
						- uang lembur Gol. III		14	OJ	50.000	700.000		
3.30.01.2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		84.250.000		
3.30.01.2.05.02						Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	50	Org		30.000.000	DAU	Kab. Luwu
5	1	02	01	01	0075	Belanja pakaian batik tradisional	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya				15.000.000		
						pakaian batik tradisional		50	Psg	300.000	15.000.000		
3.30.01.2.05.09						Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah ASN yang di fasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	Org		44.250.000	DAU	Luar Sul-Sel
5.1.02.02.12.0004						Belanja Diklat Kepemimpinan							
						[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya							
						Biaya DIKLATPIM/STRUKTURAL Spesifikasi : Diklat Pim III		2	OK	22.125.000	44.250.000		

3.30.01.2.05.11						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang di fasilitasi mengikuti bimbingan teknis	1	Org		10.000.000	DAU	Luar Kab. Luwu
3.30.01.2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah	100	%		309.338.610		
3.30.01.2.06.01						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	jenis		1.103.000	DAU	Kab. Luwu
5.1.02.01.01.0031						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					1.103.000		
						Lampu Viscom E27 68 Wat		2	Buah	143.000	286.000		
						Stop Kontak Timer Digital Heles		2	Buah	84.500	169.000		
						lampu bohlam		10	Buah	64.800	648.000		
3.30.01.2.06.02						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	unit		57.995.200	DAU	Kab. Luwu
5	1	02	02	01	0050	Belanja Kalibrasi					10.000.000		
						jasa kalibrasi		10	paket	1.000.000	10.000.000		
5	2	02	02	01	0004	Belanja modal kendaraan bermotor roda dua					41.995.200		
						mio		2	Unit	20.997.600	41.995.200		
5	2	02	10	02	0003	Belanja modal personal komputer					6.000.000		

						prntr epson		1	Unit	6.000.000	6.000.000		
3.30.01.2.06.04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	11	Jenis		2.620.910	DAU	Kab. Luwu
5.1.02.01.01.0043						Belanja Natura dan pakan-Natura					2.620.910		
						Air Galon		15	galon	5.000	75.000		
						Air Mineral Kemasan		20	dos	17.250	345.000		
						biskuit		20	bungkus	21.840	436.800		
						gula pasir		20	kg	26.000	520.000		
						kopi bubuk		9	kg	26.450	238.050		
						mie isntant		50	bks	3.500	175.000		
						permen		11	bks	13.500	148.500		
						sirup		5	btl	13.685	68.425		
						the celup		3	dos	26.000	78.000		
						the kotak		5	karton	97.750	488.750		
						tissu kotak		3	ktk	15.795	47.385		
3.30.01.2.06.05						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Jenis		1.219.500	DAU	Kab. Luwu

5.1.02.01.01.0026						belanja bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak					1.219.500		
						baliho/spanduk		15	meter	30.000	450.000		
						photo copy		2.565	lembar	300	769.500		
3.30.01.2.06.06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	jenis		25.200.000	DAU	Kab. Luwu
5.1.02.01.01.0062						Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah					25.200.000		
						Surat kabar/majalah		168	bulan	150.000	25.200.000		
3.30.01.2.06.07						Penyediaan bahan material	jumlah bahan material yang disediakan	44	jenis		20.089.900	DAU	Kab. Luwu
5	1	02	01	01	0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor					8.969.000		
						- ballpoint balliner		5	lusin	214.500	1.072.500		
						- ballpoint faster		6	lusin	42.900	257.400		
						- balpoint snowman		6	Botol	28.000	168.000		
						- binder clips 155		7	pak	20.150	141.050		
						- binder clips 200		15	pak	22.750	341.250		
						- buku folio usti 100 lembar		4	buah	26.000	104.000		
						- buku folio usti 50 lembar		5	buah	10.400	52.000		

						- cuuter		5	buah	11.700	58.500		
						- gunting		4	buah	13.000	52.000		
						- hektar besar		3	buah	45.500	136.500		
						- hektar kecil		5	buah	13.000	65.000		
						- isi cutter		5	buah	9.750	48.750		
						- isi hektar		3	pak	40.300	120.900		
						- isolasi		5	buah	13.000	65.000		
						- lakban jilid 2		4	buah	22.100	88.400		
						- lakban besar		5	buah	39.000	195.000		
						- lakban coklat		5	buah	15.600	78.000		
						- lem kertas		4	buah	11.700	46.800		
						- map		200	lembar	780	156.000		
						- map kancing		90	buah	22.100	1.989.000		
						- map ordner		50	buah	42.900	2.145.000		
						- Map plastik jepit (Tebal)		3	lusin	130.000	390.000		
						- map plastik transparan		15	lusin	42.900	643.500		
						- penggaris besi		5	buah	11.050	55.250		

						- penggaris biasa		5	buah	18.200	91.000		
						- pensil 2b		1	pak	45.500	45.500		
						- spidol snowman		6	buah	8.450	50.700		
						- spidol warna		5	buah	10.400	52.000		
						-		20	dos	13.000	260.000		
5	1	02	01	01	0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover					7.650.500		
						- ampolp 104		10	dos	19.500	195.000		
						- amplop 90		10	dos	22.100	221.000		
						- kertas A4		10	rim	70.200	702.000		
						- kertas F4		75	rim	70.200	5.265.000		
						- kertas NCR		15	rim	84.500	1.267.500		
5	1	02	01	01	0027	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos					600.000		
						- materai		60	lembar	10.000	600.000		
5	1	02	01	01	0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer					2.870.400		
						- tinta printer		23	buah	124.800	2.870.400		
3.30.01.2.06.08						Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah jenis fasilitasi tamu	3	jenis		19.875.000	DAU	Kab. Luwu

5	1	02	01	01	0052	- Belanja Makanan dan minuman Rapat			Jenis		19.200.000		
						- snack		480	kotak	15.000	7.200.000		
						- nasi kotak		480	kotak	25.000	12.000.000		
5	1	02	01	01	0053	- Belanja Makanan dan Minuman Tamu					675.000		
						- prasmanan		15	porsi	45.000	675.000		
3.30.01.2.06.09						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan ksonultasi yang di selenggarakan				181.235.100	DAU	Kab. Luwu & Luar Sul-Sel
5	1	02	04	01	0001	Belanja perjalanan dinas biasa					156.421.600		
						BBM		1.084	liter	7.650	8.292.600		
						biaya penginapan eselon II		6	org/hr	1.490.000	8.940.000		
						biaya penginapan eselon II		10	org/hr	1.550.000	15.500.000		
						biaya penginapan eselon III		6	org/hr	2.755.000	16.530.000		
						biaya penginapan staf		10	org/hr	732.000	7.320.000		
						biaya penginapan eselon III		4	org/hr	1.020.000	4.080.000		
						biaya penginapan eselon III		3	org/hr	992.000	2.976.000		
						biaya penginapan eselon IV		25	org/hr	732.000	18.300.000		
						biaya penginapan eselon IV		6	org/hr	730.000	4.380.000		

							biaya transportasi darat		12	org/pp	350.000	4.200.000		
							biaya tiket		14	org/pp	1.914.500	26.803.000		
							uang harian		70	org/pp	430.000	30.100.000		
							uang harian non ASN		20	org/pp	300.000	6.000.000		
							refsentatif		20	org/pp	150.000	3.000.000		
5	1	02	04	01	0003		Belanja perjalanan dinas dalam kota					24.813.500		
							BBM		90	liter	7.650	688.500		
							uang harian eselon IV		25	org/hr	125.000	3.125.000		
							uang harian eselon III		40	org/hr	150.000	6.000.000		
							uang hatian eselon II		50	org/hr	170.000	8.500.000		
							uang hatian staf		65	org/hr	100.000	6.500.000		
3.30.01.207							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Pemerintah Daerah Diadakan	100	%		30.000.000		
3.30.01.207.05							Pengadaan mebel	jumlah mebel yang diadakan	3	unit		30.000.000	DAU	Kab. Luwu
5	2	02	05	02	0001		Belanja modal mebel					30.000.000		
							meja rapat eselon II		1	unit	18.000.000	18.000.000		
							meje kerha eselon III		2	unit	6.000.000	12.000.000		

3.30.01.208						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	2			394.891.800		
3.30.01.208.02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik				36.160.800	DAU	Kab. Luwu
5	1	02	02	01	0061	Belanja tagihan listrik					27.760.800		
						tagihan listrik (2150 kwh x 12 bln)		25.800	kwh/bln	1.076	27.760.800		
5	1	02	02	01	0063	belanja kawat/faximili/internet/TV berlangganan					8.400.000		
						internet		12	bln	700.000	8.400.000		
3.30.01.208.04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				358.731.000	DAU	Kab. Luwu
5	1	1	03	07	0001	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan					92.520.000		
						bendahara pengeluaran		12	OB	860.000	10.320.000		
						bendaahara penrerimaan		12	OB	670.000	8.040.000		
						staf pengelola keuangan		24	OB	500.000	12.000.000		
						PPTK		12	OB	1.000.000	12.000.000		
						PPTK		24	OB	300.000	7.200.000		
						PPK SKPD		12	OB	990.000	11.880.000		
						PPKD		12	OB	2.590.000	31.080.000		

5	1	1	03	07	0002	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa					52.260.000		
						PPK Barang/jasa		36	OB	1.410.000	50.760.000		
						admin SIRUP		2	smster	750.000	1.500.000		
5	1	1	03	08	0002	belanja jasa BMD yag tidak menghasilkan pendapatan					12.000.000		
						pengurus barang		12	OB	1.000.000	12.000.000		
5	1	2	01	01	0012	belanja bahan kimia					1.150.000		
						racun rumput		10	liter	115.000	1.150.000		
5	1	2	01	01	0012	belanja bahan kimia					1.188.000		
						sabun detergen		12	pcs	12.000	144.000		
						stella gantung		10	pcs	15.000	150.000		
						sunlight		20	buah	25.000	500.000		
						suor pel		15	pcs	9.600	144.000		
						tissu		25	kotak	10.000	250.000		

5	1	2	01	01	0030	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor					1.013.000		
						kain pel		2	buah	60.000	120.000		
						kanebo		2	buah	24.000	48.000		
						keranjang sampah		2	buah	66.000	132.000		
						keset		3	buah	54.000	162.000		
						sapu lantai		5	buah	55.000	275.000		
						tempat sampah		2	buah	138.000	276.000		
5	1	2	02	01	0026	belanj jasa tenaga administrasi					103.200.000		
						asisten pribadi		24	OB	1.000.000	24.000.000		
						tenaga administrasi		132	OB	600.000	79.200.000		
5	1	2	02	01	0030	belanj jasa tenaga kebersihan					23.400.000		
						petugas kebersihan		36	OB	650.000	23.400.000		
5	1	2	02	01	0046	belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi					72.000.000		

						pengelola FMIS/SIPD		48	OB	1.500.000	72.000.000		
3.30.01.209						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	2			349.307.900		
3.30.01.209.02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	19 unit			83.350.000	DAU	Kab. Luwu
						Service berkala ganti oli kendaraan dinas Roda 4 (2 unit x 4 kali)		8	Berkala	1.000.000	8.000.000		
						Belanja Penggantian Suku Cadang Ban Mobil (2 unit x 4 ban)		8	Ban	1.000.000	8.000.000		
						Belanja Penggantian Suku Cadang accu Mobil (2 unit x 1 accu)		2	Aki	800.000	1.600.000		
						Belanja Penggantian Suku Cadang Lainnya (2 unit x 2 kali)		4	Suku cadang	6.000.000	24.000.000		
						Belanja Service berat kendaraan dinas Roda 4 (2 unit x 1 kali)		2	Berkala	3.000.000	6.000.000		
						Belanja Penggantian Suku cadang Ban Motor (7 motor x 2 Suku cadang)		14	Suku Cadang	250.000	3.500.000		
						Belanja Bahan bakar minyak/gas mobil dinas (2 unit x 12 bln)		24	unit/bln	1.000.000	24.000.000		
						Belanja pajak perizinan roda empat		4	Pajak	1.500.000	6.000.000		
						Belanja pajak perizinan roda dua		15	Pajak	150.000	2.250.000		
3.30.01.209.06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20	unit		12.400.000	DAU	Kab. Luwu
						Belanja Service AC		8	unit	500.000	4.000.000		
						Belanja Service computer		12	unit	700.000	8.400.000		

3.30.01.209.10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya					253.557.900	DAU	Kab. Luwu
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		1	Pkt	250.000.000	250.000.000		
						- Pengharum Ruangan		12	Buah	32.775	393.300		
						- Gayung Air		2	Buah	16.500	33.000		
						- Kemoceng		4	Buah	40.250	161.000		
						- Ember		2	Buah	165.000	330.000		
						- Kaset Kaki Karet		4	Buah	91.300	365.200		
						- Kaset Anti Slip		4	Buah	67.100	268.400		
						- Keranjang Sampah		4	Buah	30.800	123.200		
						- Kain Lap		4	Buah	19.250	77.000		
						- Alat Pel		2	Buah	38.500	77.000		
						- Pembersih Lantai		10	Buah	18.400	184.000		
						- Pel Loby		3	Buah	89.700	269.100		
						- Kanebo		3	Buah	23.000	69.000		
						- Serbet Tangan gantung		3	Buah	20.900	62.700		
						- Pembersih Kaca		4	Buah	16.500	66.000		
						- Pembersih Closed		8	Buah	23.100	184.800		
						- Sabun cuci tangan cair		14	Buah	25.300	354.200		
						- Sabun Cuci Piring		10	Buah	14.080	140.800		

							- Sikat kamar mandi		3	Buah	22.000	66.000		
							- Sikat WC pake tutup		3	Buah	27.500	82.500		
							- Sendok sampah		5	Buah	18.400	92.000		
							- Tisu kotak		12	Buah	13.225	158.700		
30.03							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan kondisi layak				2.717.161.797,00		
30.03.2.01							Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan kondisi layak				2.717.161.797,00		
30.03.2.01.01							Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	5 pasar			1.550.245.967,00	DAU	Kab. Luwu
							Pasar Belopa							
								Pembangunan ipal pasar belopa	1	paket	200.000.000	200.000.000,00		
							Pasar Dadeko							
								Penimbunan Halaman	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00		
							pasar keppe							
								penimbunan halamam	1	Paket	502.689.717,00	502.689.717,00		
							pasar larompong							
								penimbunan halaman	1	Paket	112.556.250,00	112.556.250,00		
								rehabilitasi pasar	1	Paket	85.000.000	85.000.000,00		
							pasar padang sappa							
								pembangunan saran air bersih dan MCK	1	Paket	200.000.000,00	200.000.000,00		

								pembangunan saluran drainase	1	Paket	150.000.000,00	150.000.000,00		
								pembebasan lahan	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00		
30.03.2.01.01							Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	16	Pasar		1.166.915.830	DAU	Kab. Luwu
								Alat tulis kantor	1	keg	2.804.950,00	2.804.950,00		
								Kertas dan cover	1	keg	14.441.150,00	14.441.150,00		
								bahan cetak	1	keg	2.130.050	2.130.050,00		
								bahan komputer	1	keg	6.548.200,00	6.548.200,00		
								makan minum rapat	1	keg	17.400.000,00	17.400.000,00		
								Honorarium tim pelaksana kegiatan	1	keg	103.850.000,00	103.850.000,00		
								honorarium rohaniawan	1	keg	3.000.000,00	3.000.000,00		
								tenaga adminitrasi	1	keg	561.240.000,00	561.240.000,00		
								operator komputer	1	keg	48.000.000,00	48.000.000,00		
								tenaga keamanan	1	keg	48.000.000,00	48.000.000,00		
								jasa penulisan dan penerjemah	1	keg	45.000.000,00	45.000.000,00		
								jasa konversi aplikasi	1	keg	18.000.000,00	18.000.000,00		
								tagihan listrik	1	keg	12.084.480,00	12.084.480,00		
								belanja perjalanan dinas biasa	1	keg	228.769.500,00	228.769.500,00		
								perjalanan dinas dalam kota	1	keg	55.647.500,00	55.647.500,00		

3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					257.354.787		
3	30	04	2	01		Menjamin Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kab/Kota					18.524.250		
3	30	04	2	01	01	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi & Singkronisasi				10.292.500	DAU	Kab. Luwu
							Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi : snack/kudapan	30	Orang/Kota k	25.000,00	750.000,00		
							Makan Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Nasi Kotak	30	Orang/Kota k	15.000,00	450.000,00		
							BBM	1	ls	392.500,00	392.500,00		
							Perjalanan dinas dalam negeri	1	ls	8.700.000,00	8.700.000,00		
3	30	04	2	01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pelaksanaan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting				4.050.000	DAU	Kab. Luwu
							Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi : snack/kudapan	20	Orang/Kota k	15.000	300.000,00		
							Makan Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Nasi Kotak	20	Orang/Kota k	25.000	500.000,00		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	3.250.000	3.250.000,00		
3	30	04	2	01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.	Laporan pelaksanaan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting				4.181.750	DAU	Kab. Luwu

							BBM	1	ls	431.750,00	431.750,00		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	3.750.000,00	3.750.000,00		
3	30	04	2	02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten	100	%		217.823.737,00		
3	30	04	2	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12	Kali		32.262.537	DAU	Kab. Luwu
							Alat tulis kantor	1	ls	2.773.637,00	2.773.637,00		
							Iklan/reklame	3	kali	2.200.000,00	6.600.000,00		
							Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Pertalite	152	Liter	7.850,00	1.193.200,00		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	12.900.000,00	12.900.000,00		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah	1	ls	8.795.700,00	8.795.700,00		
3	30	04	2	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		10	Kali		6.731.750,00	DAU	Kab. Luwu
							makan minum rapat -nasi kotak	60	OK	25.000,00	1.500.000,00		
							makan minum rapat -snack	60	OK	15.000,00	900.000,00		

							BBM	55	ltr	7.850,00	431.750,00		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	3.900.000,00	3.900.000,00		
3	30	04	2	02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota	Lokasi Pasar Murah	1			178.829.450	DAU	Kab. Luwu
							Bahan Sembako	1	Keg	145.000.000	145.000.000		
							kemasan	1000	lbr	13.000	13.000.000		
							Jasa Upah Kerja	5	Org	350.000	1.750.000		
							Belanja cetak spanduk	1	Keg	416.500	416.500		
							Belanja cetak banner	1	Keg	90.000	90.000		
							Belanja Cetak Kupon	1000	lbr	800	800.000		

							Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi : snack/kudapan	24	Orang/kota k	15.000	360.000		
							Makan Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Nasi Kotak	24	Orang/kota k	25.000	600.000		
							Belanja bahan bakar minyak	85	ltr	7.850	667.250		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	7.350.000	7.350.000		
							Satuan Uang Harian Perjalanan luar daerah	1	ls	8.795.700	8.795.700		
3	30	04	2	03		pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota		100	%		21.006.800,00		
3	30	04	2	03	01	pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan	10	Kali		2.092.500	DAU	Kab. Luwu
							Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : Pertalite	50	Liter	7.850	392.500		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	1.700.000	1.700.000		
3	30	04	2	03	02	pengawasan pegadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	10	Kali		5.362.500	DAU	Kab. Luwu

							Kudapan (snack) Rapat/Pertemuan Spesifikasi : snack/kudapan	8	Orang/kota k	15.000	120.000		
							Makan Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Nasi Kotak	8	Orang/kota k	25.000	200.000		
							Bahan bakar minyak	50	ltr	7.850	392.500		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	4.650.000	4.650.000		
3	30	04	2	03	03	pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Pelaksanaan Pegawasan	3	Kali		13.551.800	DAU	Kab. Luwu
							Bahan bakar minyak	48	ltr	7.850	376.800		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	13.175.000	13.175.000		
3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DALAM WILAYAH PROV. SUL. SEL. DAN LUAR PROV. SUL. SEL.	Cakupan penyelenggaraan kewenangan daerah dalam rangka Pengembangan Ekspor				214.781.500		
3	30	05	2	01		penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk desa unggulan	Pameran Produk Unggulan di dalam Daerah dan Luar Daerah Sul. Sel.	100	%		214.781.500		
3	30	05	2	01	02	Pameran Dagang nasional	Pameran Produk dan Potensi Daerah di Luar Prov.Sul. Sel.	1	Kali		104.719.000	DAU	Luar Sul-Sel
							bahan pameran	1	keg	20.351.000	20.351.000		
							cetak spanduk dan benner	7	Meter	250.000	1.750.000		
							cetak dos	1	paket	1.210.000	1.210.000		
							sewa stand	1	keg	30.375.000	30.375.000		
							dekorasi	1	Keg	10.000.000	10.000.000		

							snack rapat	20	OK	15.000	300.000		
							makan rapat	20	OK	25.000	500.000		
							batik seragam	6	Imbr	350.000	2.100.000		
							Perjalanan Dinas Luar Daerah Prov. Sul Sel.	1	keg	38.133.000	38.133.000		
3	30	05	2	01	03	Pameran Dagang Lokal	Pameran Produk dan Potensi Daerah Dalam Provinsi	1	Kali		110.062.500	DAU	Kab. Luwu
							bahan pameran	1	keg	13.701.000	13.701.000		
							cetak spanduk dan benner	7	Meter	250.000	1.750.000		
							cetak dos	1	paket	1.083.500	1.083.500		
							sewa stand	1	keg	33.000.000	33.000.000		
							dekorasi	1	Keg	10.000.000	10.000.000		
							sewa pakaian adat	1	Keg	3.000.000	3.000.000		
							snack rapat	20	OK	15.000	300.000		
							makan rapat	20	OK	25.000	500.000		
							batik seragam	9	Imbr	350.000	3.150.000		
							Perjalanan Dinas Luar Daerah Prov. Sul Sel.	1	keg	43.578.000	43.578.000		
3	30	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100,00	%		87.691.150,00		
3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100,00	%		87.691.150,00		
3	30	06	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang	50	Kali		18.287.500,00	DAU	Kab. Luwu

							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	1	ls	18.287.500	18.287.500,00		
							Satuan Uang Harian Perjalanan luar daerah	1	ls	13.816.000	13.816.000,00		
3	30	06	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan	12	Kali		49.906.150	DAU	Kab. Luwu
							Alat tulis kantor	1	keg	3.855.150	3.855.150		
							makan minum rapat	1	keg	6.000.000	6.000.000		
							bahan bakar minyak	196	ltr	13.250	2.597.000		
							perjalanan dalam negeri	200	OH	170.000	34.000.000		
							perjalan luar daerah	1	keg	3.454.000	3.454.000		
3	30	06	2	01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52	Kali		19.497.500	DAU	Kab. Luwu
							Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Spesifikasi : dexlite	150	Liter	13.250	1.987.500		
							Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SULAWESI SELATAN	103	OH	170.000	17.510.000		



BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Perdagangan tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak terlepas dari rencana strategi OPD tahun 2019 – 2024 dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap stakeholders (Pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Perdagangan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan terkecuali jika ada kegiatan yang sifatnya mendesak dan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang dibuat.
4. Pengevaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian kinerja seluruh aparat.

Semoga Renja Dinas Perdagangan Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022, dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

Belopa,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Drs. H U S A I N

Pkt : Pembina Utama Muda
NIP : 19640510 199203 1 010